

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
NONFORMAL (STUDI TENTANG PROGRAM BELAJAR
KESETARAAN PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DI KECAMATAN MUARA JAWA**

Inah Nuryani, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 1, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal (Studi Tentang Program Belajar Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar di Kecamatan Muara Jawa).

Pengarang : Inah Nuryani

NIM : 1802015084

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Maret 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 19590308 198403 3 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik
Volume : 13
Nomor : 1
Tahun : 2025
Halaman : 220-229

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NONFORMAL (STUDI TENTANG PROGRAM BELAJAR KESETARAAN PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KECAMATAN MUARA JAWA

Inah Nuryani ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan program belajar kesetaraan di SKB Muara Jawa serta mengidentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, fokus penelitian dianalisis berdasarkan enam aspek, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikai, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Informasi dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala SKB Muara Jawa, Kepala bidang pelatihan dan pengembangan, serta para guru, sedangkan informannya adalah peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah tantangan, pelaksanaan pendidikan nonformal khususnya program belajar kesetaraan di Kecamatan Muara Jawa telah berjalan cukup lancar. Kesulitan yang dihadapi antara lain kekurangan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari program belajar kesetaraan, yang menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya program tersebut.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kesetaraan*

Pendahuluan

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pendidikan. Setiap individu dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dan bersaing secara positif melalui peningkatan kemampuan guna meraih peluang yang ada demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Manusia menggunakan pendidikan sebagai kompas untuk menentukan arah tujuan, dan makna hidupnya, mulai dari dalam kandungan hingga lanjut usia. (Syaputra, 2022:17)

Salah satu dari banyak permasalahan yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia adalah angka putus sekolah yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: inanuryani00@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

beberapa faktor, termasuk faktor sosial budaya dan ekonomi. Banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan merasa tidak nyaman karena tekanan dunia kerja modern yang memerlukan ijazah pendidikan agar dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Khususnya di Kecamatan Muara Jawa yang masih banyak terdapat masyarakat putus sekolah. Berdasarkan data dari Muara Jawa dalam Angka (2022), terdapat sekitar 400 anak putus sekolah. Bagi pemerintah Kecamatan Muara Jawa, dan khususnya Dinas Pendidikan setempat kondisi ini menjadi perhatian utama.

Ada tiga jalur membentuk pendidikan di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan sistematis dan berjenjang yang berlangsung diluar pendidikan sekolah formal dengan tujuan untuk membantu mereka yang memerlukan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa membentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) sebagai sarana pendidikan nonformal untuk mengatasi persoalan angka putus sekolah. Bagi yang ingin mengganti, menambah atau menyelesaikan pendidikannya, SKB Muara Jawa menawarkan program pendidikan nonformal melalui program pembelajaran kesetaraan.

Menurut Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan, program pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal. Dalam kurikulum ini siswa akan mempelajari masing-masing paket A setara (SD/MI), paket B setara (SMP/MTs), dan paket C setara (SMA/MA) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Meskipun pendidikan kesetaraan terjadi di luar sistem pendidikan formal, lulusan yang lulus ujian kesetaraan mempunyai tingkat kompetensi yang sama dengan lulusan yang menyelesaikan sekolah formal. Tujuan dari program belajar kesetaraan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan setiap orang, memberikan mereka akses terhadap pendidikan, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan, membantu mereka mengembangkan keterampilan hidup dan membantu mereka menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diidentifikasi adalah bagaimana pelaksanaan program belajar kesetaraan di SKB Muara Jawa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Kebijakan publik menurut Dye dalam Islamy (2016:15) adalah setiap pilihan yang diambil pemerintah mengenai apa yang sebaiknya dilakukan atau

tidak dilakukan (*public policy is whatever government chooses to do or not to do*). Konsep ini mencakup pilihan pemerintah untuk memilih tidak bertindak, yang tetap dianggap sebagai kebijakan publik karena merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan tertentu. Pendapat serupa disampaikan oleh Edward III dalam Islamy (2016:16) yang menyampaikan pandangan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan pemerintah, termasuk perlu atau tidaknya mengambil suatu tindakan.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Suwitri (2014:20) mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai oleh pemerintah, kebijakan publik bertujuan mencerminkan nilai-nilai tersebut melalui program-program yang diterapkan dengan cara yang terarah. Kebijakan publik menurut Anggara (2018:35) merupakan suatu pilihan yang dibuat dan dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang mempunyai implikasi umum dan strategis bagi masyarakat luas.

Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2015:214), penerapan kebijakan merupakan langkah penting dalam rangkaian kebijakan secara keseluruhan karena memungkinkan penyelesaian masalah publik atau dibiarkan sehingga tidak terselesaikan. Dalam konsep ini jika kebijakan dalam situasi seperti ini tidak dilakukan, maka kebijakan tersebut hanya akan ada sebagai konsep atau rencana yang tersimpan dalam arsip.

Winarno (2014:149) sependapat dengan Nugroho mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari suatu program atau kebijakan, dan program kebijakan jika tidak diterapkan hanya akan menjadi catatan elite saja.

Jones dalam Mulyadi (2016:45) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merealisasikan program mencapai hasil yang diinginkan, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat tercapai.

Pendidikan Nonformal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah suatu jalur pendidikan yang terstruktur, berjenjang di luar pendidikan formal yang diperuntukkan bagi warga negara yang tidak mampu mengikuti atau menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang tertentu.

Sementara itu, pendidikan nonformal diberikan kepada mereka yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap dan penambah pendidikan formal dalam rangka mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Pernyataan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Pendidikan Kesetaraan

Program pendidikan kesetaraan khususnya paket A, paket B dan paket C merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum sejenis SD/MI, SMPMTs, dan SMA/MA, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa hasil pendidikan kesetaraan memiliki standar kompetensi lulusan yang setara dengan pendidikan formal.

Definisi konsepsional

Program belajar kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang bertujuan menyediakan kesempatan belajar bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan sekolah formal. Program ini menawarkan pendidikan umum setara dengan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Program ini berpotensi memberikan keuntungan bagi mereka yang telah putus sekolah, dengan memberikan kesempatan untuk memberdayakan diri, mendapatkan akses untuk meningkatkan pendidikan, dan menyelesaikan kewajiban belajar selama 12 tahun.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian terbagi menjadi dua hal, yaitu: pertama, implementasi kebijakan pendidikan nonformal dikaji melalui analisis program belajar kesetaraan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan enam indikator : (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) disposisi/sikap agen pelaksana, (5) komunikasi, (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Fokus penelitian yang kedua adalah mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program belajar kesetaraan di SKB Kecamatan Muara Jawa.

Sumber data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Peserta didik di SKB Muara Jawa menjadi informan dalam penelitian ini, sedangkan Kepala SKB Muara Jawa, Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan guru berperan sebagai informan kunci.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara dan observasi. Miles Huberman dan Saldana (2014) mengemukakan teknik analisis interaktif untuk analisis data yang terdiri dari empat tahap: (1) pengumpulan data, (2) kondensasi data, (3) penyajian data, (4) penyusunan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Belajar Kesetaraan di SKB Muara Jawa

Program belajar kesetaraan adalah sebuah inisiatif dari pendidikan nonformal, yang saat ini sedang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan implementasi Van Metter Van Horn yang dikutip dalam Winarno (2016), untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Berikut uraian temuan penelitian:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter Van Horn yang dikutip oleh Winarno (2016:159-160) keberhasilan suatu kebijakan dapat dinilai dari seberapa memenuhinya tujuan dan kriteria atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Menetapkan tujuan dan standar yang tepat harus dipenuhi oleh para pelaksana kebijakan, hal ini sangatlah penting dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan temuan, terdapat kriteria untuk menerapkan program belajar kesetaraan. Standar tersebut mencakup sejumlah unsur antara lain perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil dan proses pembelajaran, serta pengawasan untuk menjamin kelancaran pembelajaran.

Terkait target, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belajar kesetaraan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh penduduk Kecamatan Muara Jawa dengan menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan.

2. Sumber Daya

Van Metter Van Horn yang dikutip dalam Winarno (2016:161) menegaskan bahwa sumber daya setidaknya terdiri dari tiga komponen: 1) anggaran, 2) sarana dan prasarana, 3) sumber daya manusia.

a. Anggaran

Sumber daya finansial yang digunakan oleh SKB Muara Jawa untuk melaksanakan program belajar kesetaraan berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Sarana dan Prasarana

Sumber daya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program belajar kesetaraan dapat dikatakan sudah memadai untuk menyediakan fasilitas yang baik bagi peserta didik. SKB Muara Jawa memiliki beberapa ruang kelas dan ruang keterampilan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti meja dan kursi belajar, komputer, serta peralatan untuk kursus menjahit.

c. Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), SKB Muara Jawa memiliki tenaga pengajar dan staf yang sudah cukup kompeten dalam melaksanakan program belajar kesetaraan. Para Guru dan staf yang ada merupakan lulusan sarjana, baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Hal ini

memungkinkan guru-guru tersebut untuk memberikan bimbingan yang baik kepada peserta didik. Namun, penelitian ini menemukan masalah terkait dengan kurangnya jumlah guru dan staf, yang mengakibatkan tumpang tindih tugas yang dapat menghambat kelancaran proses pembelajaran.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Van Metter Van Horn dikutip dari Winarno (2016:166), menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif diperlukan suatu peta untuk menggambarkan secara umum aktivitas dari berbagai bagian agar dapat memahami tugas dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi, standar dan pola interaksi dalam badan eksekutif merupakan ciri-ciri agen pelaksana.

a. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

SKB Muara Jawa memiliki struktur organisasi yang definisi secara jelas dan berfungsi secara struktural, dengan pembagian tugas dan wewenang yang berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

b. Pengawasan

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program belajar kesetaraan dilakukan langsung oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa, sementara itu pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan SKB dilaksanakan oleh Kepala SKB dengan bantuan staf dan guru yang ada di SKB tersebut.

4. Disposisi/Sikap Agen Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan, dibutuhkan pelaksana kebijakan yang berkompeten, kapabel, dan berkualitas. Van Metter Horn dalam Agustino (2020:133) menyatakan bahwa kemampuan pelaksana program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program. Jika sikap pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif, maka mereka akan mampu melaksanakan kebijakan dengan baik.

Terkait dengan variabel disposisi, yang menekankan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh pelaksana yang memiliki sikap atau kesediaan yang baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan program yang telah ditetapkan, sumber daya manusia di SKB Muara Jawa sudah berkompetensi dalam mengelola pembelajaran nonformal, memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, sabar, serta memiliki jiwa sosial. Selain itu, mereka juga sudah mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, serta memiliki kesediaan dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program belajar kesetaraan.

5. Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan publik. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses implementasi akan lebih kecil jika terdapat lebih banyak koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang terlibat, dan sebaliknya. Menurut Agustino

(2020:144), selain komunikasi internal organisasi, komunikasi eksternal juga sangat penting dilakukan, karena setiap penyelenggaraan program disarankan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak atau komponen yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terkait variabel komunikasi, SKB Muara Jawa telah membangun komunikasi yang baik, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Hal ini penting karena prospek keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi para pelaksana kebijakan yang akurat dan konsisten.

a. Komunikasi Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa telah terjalin komunikasi, baik itu di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Rapat internal dilakukan oleh para pelaksana sebelum menetapkan agenda kegiatan, dengan tujuan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bersama-sama di antara pelaksana kebijakan dalam organisasi. Selain itu, kerjasama dengan pihak luar juga dilakukan, melibatkan beberapa pihak seperti, pemerintah desa, Kepala sekolah pendidikan formal, lembaga kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, dan LPM

b. Intensitas Komunikasi

Komunikasi melibatkan dinamika antara kelompok maupun individu, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program belajar kesetaraan, proses penyampaian informasi telah dilakukan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui sosialisai langsung yang diselenggarakan di Balai Desa, serta penyebaran informasi melalui media sosial (*whatsapp*) yang kemudian diteruskan oleh para Kepala Lurah kepada warganya.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Metter Van Horn dalam Winarno (2016:167), sejauh mana faktor eksternal berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan yang ditetapkan berdampak pada seberapa baik kebijakan diimplementasikan. Hal ini terkait dengan dukungan lingkungan, baik itu mendukung atau menolak, serta sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Mengenai faktor eksternal tersebut, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi dalam konteks penelitian ini mencakup karakteristik kondisi masyarakat Kecamatan Muara Jawa, seperti: mereka yang telah putus sekolah, sudah bekerja, hanya memiliki waktu luang pada hari sabtu dan minggu, kurang menyadari pentingnya belajar, motivasi belajar yang rendah, dan lebih memprioritaskan bekerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan kondisi masyarakat yang sangat beragam, hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada di SKB Muara Jawa. Kesibukan yang

dimiliki oleh kelompok sasaran membuat mereka kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

b. Dukungan Elit Politik

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program belajar kesetaraan, karena mereka juga memiliki harapan yang besar terhadap keberhasilan program tersebut. Beberapa bentuk dukungan pemerintah antara lain: memberikan pelatihan kepada staf dan guru SKB untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberikan pelatihan keterampilan kepada peserta didik untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka selama menjadi peserta didik. Peningkatan keterampilan diberikan melalui pelatihan kecakapan wirausaha (PKW) dan pelatihan kecakapan hidup (PKH)

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan program belajar kesetaraan di SKB Muara Jawa

1. Sumber Daya Manusia

Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Muara Jawa menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga pengajar (guru), dengan proses rekrutmen yang sulit (seleksi yang panjang dan birokratis) serta rendahnya minat untuk bekerja di SKB menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan sumber tenaga kerja.

2. Sulitnya Menarik Minat Masyarakat

Kesulitan dalam menarik partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta didik di SKB Muara Jawa merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi Latar Belakang Masyarakat

Keberagaman latar belakang masyarakat menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi. Masyarakat yang putus sekolah namun sudah bekerja sering kali kesulitan dalam membagi waktu antara mengikuti program belajar kesetaraan atau melanjutkan pekerjaan mereka. Para pekerja juga menghadapi kesulitan mendapatkan izin dari tempat kerja, sehingga mereka cenderung lebih memilih bekerja daripada mengikuti jadwal belajar di SKB.

b. Kurangnya Sosialisasi

Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi SKB dan manfaat dari program belajar kesetaraan menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami keuntungan yang diperoleh dari program tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelusuran peneliti, dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, namun program belajar kesetaraan di SKB Kecamatan Muara Jawa telah berhasil menerapkan kebijakan pendidikan nonformal. Cara terbaik untuk memberikan layanan pendidikan kepada mereka yang telah putus sekolah adalah dengan menerapkan kebijakan program kesetaraan.

Masyarakat yang putus sekolah tetap dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan menggunakan ijazah untuk melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan berkat pendidikan kesetaraan, yaitu jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sebanding dengan pendidikan formal. Namun, harapan tersebut belum tercapai secara maksimal karena kurangnya tenaga pengajar dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program belajar kesetaraan yang telah diselenggarakan.

Saran

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan dalam mengimplementasikan program belajar kesetaraan di SKB Muara Jawa, antara lain:

1. Penelitian ini menemukan bahwa SKB Muara Jawa kekurangan tenaga kerja terutama guru, sehingga proses pengajaran menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan penambahan jumlah guru melalui perekrutan agar para guru tidak terbebani dengan mengajar lebih dari satu jenjang pendidikan. Dengan demikian, guru dapat memberikan perhatian lebih fokus dan optimal kepada peserta didik.
2. Penelitian ini juga menemukan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program belajar kesetaraan yang dilaksanakan oleh SKB Kecamatan Muara Jawa. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan forum pertemuan rutin, seperti forum terbuka di tingkat kelurahan untuk melibatkan masyarakat agar informasi yang disampaikan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk mendengarkan umpan balik dari masyarakat mengenai kebijakan program belajar kesetaraan.
 - b. Kolaborasi dengan organisasi atau lembaga masyarakat untuk membantu mendistribusikan informasi secara lebih luas. Organisasi kemasyarakatan dapat berperan sebagai jembatan untuk menjangkau masyarakat lebih efektif.
 - c. Memaksimalkan penggunaan media sosial, dikarenakan berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum menemukan akun resmi media sosial dari SKB Muara Jawa. Pemanfaatan media sosial, seperti website resmi, facebook dan instagram dapat memperluas jangkauan penyebaran informasi. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait SKB Muara Jawa dan program-program yang dijalankan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2ed.)*. Bandung. CV Alfabeta
- Amrulah, Rully. (2022). *Kecamatan Muara Jawa dalam Angka 2022* (Rahmah, A dan Efendy (Eds)). Muara Jawa. Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara. Diunduh dari: <https://kukarkab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/4867d80386dca42f0c5ac77d/kecamatan-muara-jawa-dalam-angka-2022.html>
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*(2 ed). Bandung. CV Pustaka Setia.
- Islamy, Muhammad Irfan. (2016). *Kebijakan Publik* (Edisi2). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (K. Perry (ed.); 3 ed.). SAGE Publications, Inc. Diunduhdari: <https://www.pdfdrive.com/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook-d183985418.html>
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik* (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (ed.); 2 ed.). Bandung: Alfabeta Bandung.
- Nugroho, Riant. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. (ed2). Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Suwitri, Purnaweni, dan Kismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi 3) Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Syaputra, Ricky. (2023). *Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal. Vol 9, (1) January 2023. Diunduh dari: <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/1525/1172>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. (T. Admojo (ed); 2 ed). Yogyakarta. CAPS (Center of Academic Publshing Service).